



2024

# LAPORAN KINERJA

KPP MADYA GRESIK

Tahun Anggaran  
2024

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum w.w.,  
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat mengabdikan pada tanah air dan mengamankan penerimaan negara demi tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Tahun 2024 merupakan akhir dari rencana strategis yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tersusun dalam Rencana Strategis (renstra) 2020-2024 yang disahkan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020. Besar harapan kita untuk menyongsong Tahun 2025 semakin gemilang dan dapat mempertahankan penerimaan negara sesuai dengan target yang diemban.

Tidak hanya berhenti pada pencapaian yang sudah diraih, DJP juga melangkah ke depan dengan implementasi *CoreTax*. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses pengelolaan data dan sistem, meningkatkan efisiensi, serta memberikan fondasi yang kokoh untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Gresik berkomitmen Menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) guna menggambarkan pencapaian guna menghimpun penerimaan pajak selama tahun 2024 serta mencerminkan komitmen keras dan kerja sama yang erat dari seluruh jajaran. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi informasi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan pelaksanaan program/kegiatan DJP serta digunakan untuk bahan evaluasi kinerja agar dapat tetap Tangguh menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Agung Sumaryawan



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang.....	1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
Sumber Daya Manusia .....	3
Sistematika Pelaporan .....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	5
Rencana Strategis .....	5
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	6
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
Capaian Kinerja Organisasi .....	8
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak .....	8
IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas .....	13
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).....	17
IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi .....	20
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) .....	24
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan .....	27
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.....	31
IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis.....	35
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis.....	38
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan .....	41
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.....	46
IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian.....	49
IKU Tingkat efektivitas penagihan .....	52
IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan .....	55
IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan.....	58
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM.....	61
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit .....	67
IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko .....	70

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran .....	73
Realisasi Anggaran.....	78
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	79
Kinerja Lain-Lain.....	79
BAB IV PENUTUP.....	80
LAMPIRAN.....	81
Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Periode 31 Desember 2024 .....	81
Keputusan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Tentang Penghargaan Kinerja Tahun 2024 .....	82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamikan perkembangan dunia yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut perlu senantiasa direspons dengan baik demi keberlangsungan negara, oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukan pemasukan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan sebagai respons negara terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

KPP Madya Gresik merupakan salah satu unit vertikal dari unit eselon I DJP yang mulai beroperasi sejak tanggal 24 Mei 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang mengemban tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara di bawah unit eselon II Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur II. Usaha yang telah dilaksanakan dan capaian-capaian yang telah didapat di tahun 2024 didokumentasikan melalui LAKIN ini yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2024, KPP Madya Gresik telah menghadapi banyak tantangan dalam pencapaian rencana strategis yang telah ditetapkan, diantaranya target penerimaan pajak yang tinggi, perekonomian yang dinamis, serta wilayah kerja yang luas menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Madya Gresik untuk melaksanakan tugasnya.

Tantangan-tantangan tersebut telah berhasil dilewati dengan perjuangan dan kolaborasi yang baik sehingga target kinerja organisasi di tahun 2024 tercapai dengan predikat kinerja ISTIMEWA (NKO 109,60).

### **TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya mempunyai tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

## **Tugas**

Kantor Pelayanan Pajak Madya Gresik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **Fungsi**

Untuk menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Madya Gresik memiliki fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. pelaksanaan administrasi kantor.

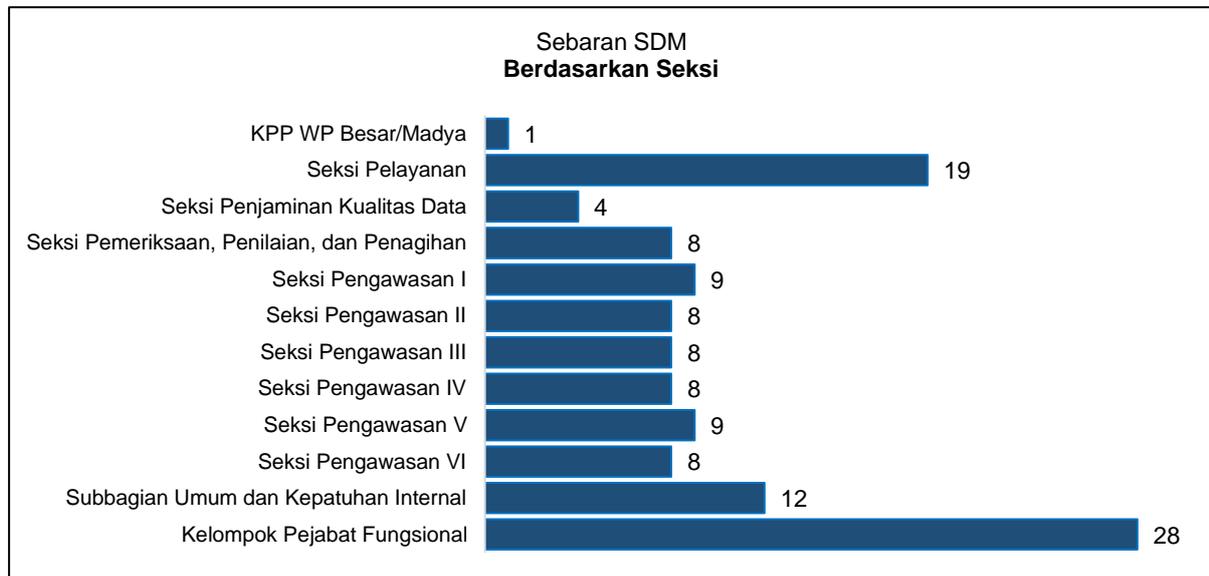
## **Struktur Organisasi**

Sedangkan susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Gresik adalah:

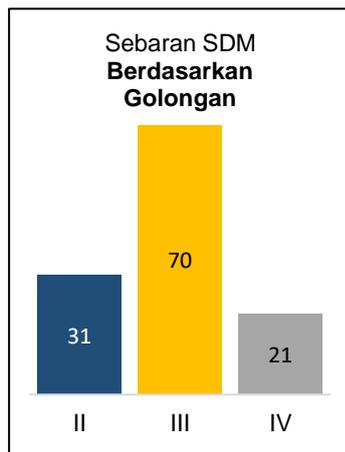
- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

## SUMBER DAYA MANUSIA

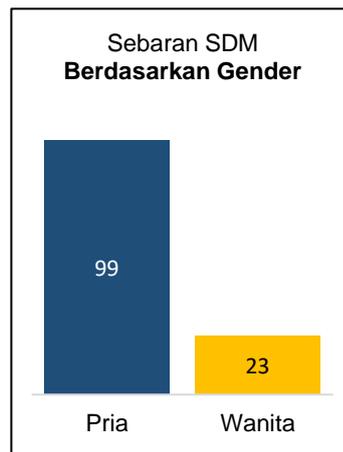
Sumber Daya Manusia (SDM) pada KPP Madya Gresik per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 122 Pegawai dengan rincian sebagai berikut,



Grafik 1.1 Sebaran SDM Berdasarkan Unit Organisasi



Grafik 1.3 Sebaran SDM Berdasarkan Golongan



Grafik 1.2 Sebaran SDM Berdasarkan Gender

## SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPP Madya Gresik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya manusia, serta sistematika pelaporan.

## Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan ringkasan/ikhtisar mengenai perencanaan strategis; dan proses penyusunan kinerja di tahun 2024. Pada Bab ini disajikan juga proses penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025.

## Bab III. Akuntabilitas Kinerja

### 1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis (SS) organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### 2. Realisasi Anggaran

Subbab ini mengelaborasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### 3. Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Pada Subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

### 4. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan *achievement* yang didapat oleh organisasi selama tahun 2024.

### 5. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini disajikan program evaluasi internal yang telah dilakukan oleh unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun tindak lanjut yang dilakukan atas hasil evaluasi tersebut pada tahun 2024.

## Bab IV. Penutup

Bab ini berisi narasi penutup atas capaian kinerja KPP Madya Gresik selama tahun 2024.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### RENCANA STRATEGIS

Renstra merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profil DJP.
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
4. Arah Kebijakan DJP.
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

#### 1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah:

*“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Eisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.*

#### 2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

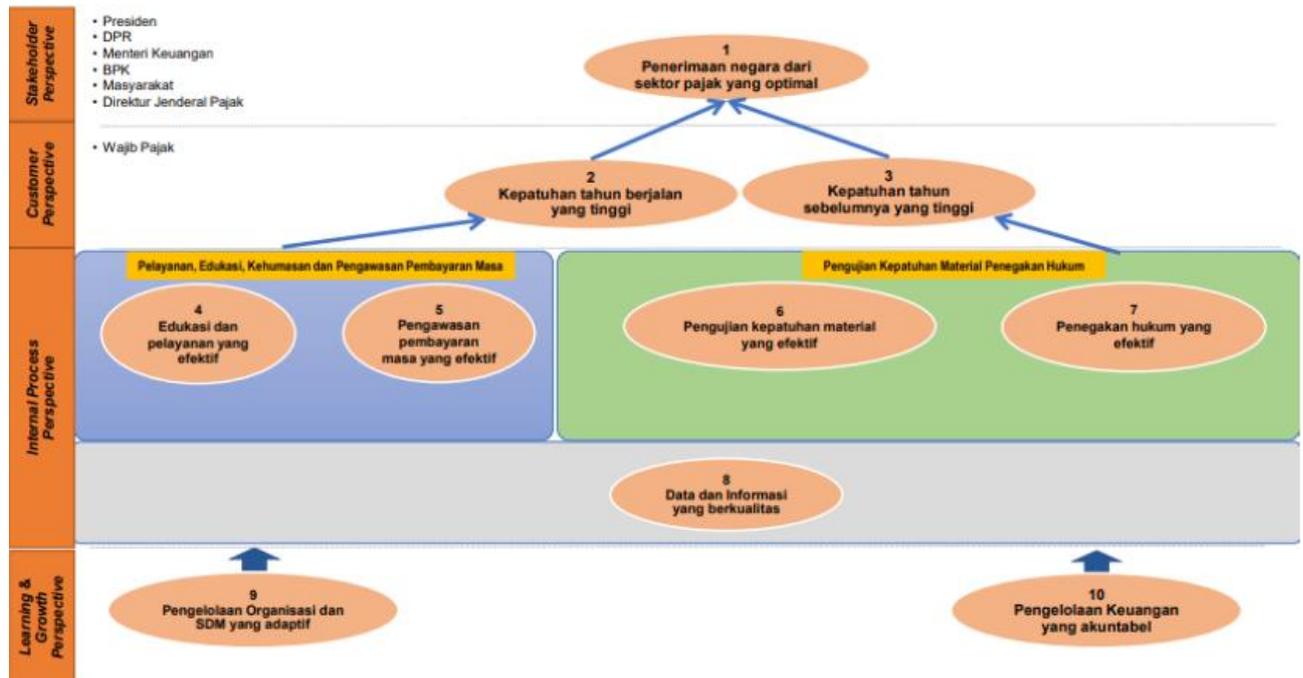
- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020).

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja.

# PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

## Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tentang Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, dan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.



Gambar 2. 1 Peta Strategi Tahun 2024

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Individu (IKI) sebanyak 19 IKU/IKI. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP.

DJP selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU/IKI. Penyempurnaan (refinement) IKU/IKI dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU/IKI semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU/IKI, definisi IKU/IKI, serta target IKU/IKI.

## Piagam Manajemen Risiko

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi Unit Pemilik Risiko (UPR).

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan seluruh jajaran di KPP Madya Gresik. Piagam manajemen risiko dan dokumen pendukung KPP Madya Gresik disahkan pada tanggal 25 Januari 2024 dengan total 12 kejadian risiko yang berhasil diidentifikasi dan dari 12 kejadian risiko tersebut, 4 kejadian risiko dilakukan mitigasi. Ringkasan profil risiko yang menjadi bagian dari piagam manajemen risiko tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko	Level Dampak					Level Risiko	Jumlah Risiko	Warna
	1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan			
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	7 ★ 9.1	12	17	22	27	Sangat Tinggi (5)	Merah
	4 Sering Terjadi	4	9	14	19	24	Tinggi (4)	Oranye
	3 Kadang Terjadi	3	★ 11.1	8	13	18	Sedang (3)	Kuning
	2 Jarang Terjadi	2	6	11	16	21	Rendah (2)	Hijau
	1 Hampir Tidak Terjadi	1 ★ 4.1, ★ 5.1, ★ 6.1, ★ 7.1, ★ 8.1	5	10	15	20	Sangat Rendah (1)	Biru

Gambar 2. 2 Peta Risiko KPP Madya Gresik 2024

Namun, Piagam Manajemen Risiko yang sifatnya dinamis dan dimungkinkan dilakukannya perubahan sesuai dengan dinamika yang berlaku, pada tanggal 3 Oktober 2024 dilakukan adendum pertama. Ringkasan adendum pertama adalah sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko	Level Dampak					Level Risiko	Jumlah Risiko	Warna
	1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan			
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	7 ★ 9.3	12	17	22	27	Sangat Tinggi (5)	Merah
	4 Sering Terjadi	4	9	14	19	24	Tinggi (4)	Oranye
	3 Kadang Terjadi	3	★ 10.1	8	13	18	Sedang (3)	Kuning
	2 Jarang Terjadi	2	6	11	16	21	Rendah (2)	Hijau
	1 Hampir Tidak Terjadi	1 ★ 4.1, ★ 5.1, ★ 6.1, ★ 7.1, ★ 8.1	5	10	15	20	Sangat Rendah (1)	Biru

Gambar 2. 3 Peta Risiko adendum pertama KPP Madya Gresik 2024

## PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

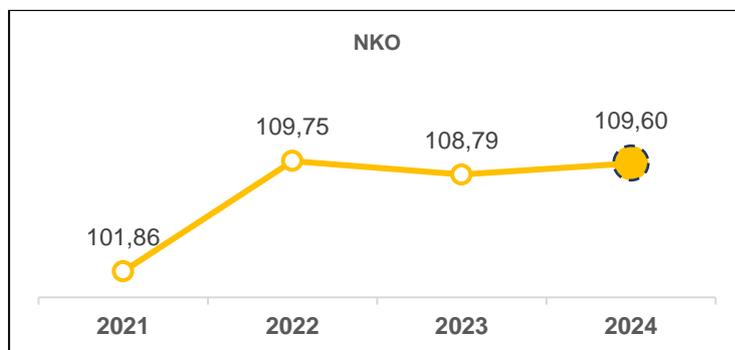
Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Koordinator Kinerja Organisasi (KKO)-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan peta strategi, Sasaran Strategis (SS), dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Rencana Kerja (Renja), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Perkembangan NKO KPP Madya Gresik sejak mulai beroperasi dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Grafik 2. 1 Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Gresik 2021-2024  
Sumber: mandor-djp diunduh pada tanggal 16 Januari 2025

Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 109,60. Pada tahun 2024, semua IKU/IKI (19 IKU/IKI) berstatus hijau.

### Stakeholder Perspective

#### SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

#### IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

##### 1. Pebandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	26,00%	47,00%	47,00%	69,00%	69,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	18,95%	47,66%	47,66%	61,63%	61,63%	100,05%	100,05%
Capaian	72,88	101,40	101,40	89,32	89,32	100,05	100,05

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi SS

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM); Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100$$

d. Realisasi IKU

No	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2023	2024	% Growth 2023	%Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	2.583.345,30	2.524.729,89	2.782.775,87	-1,28%	10,22%	100,76%	107,72%
B	PPN dan PPnBM	5.357.318,35	4.942.928,91	5.157.855,69	13,79%	4,35%	103,43%	96,28%
C	PBB dan BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D	Pajak Lainnya	1.581,91	5.672,88	5.440,66	-36,17%	-4,09%	159,12%	343,93%
E	PPh Migas	0,00	-1,25	0,25	97,78%	120,18%	0,00%	0,00%
<b>Total Non PPh Migas</b>		<b>7.942.245,55</b>	<b>7.473.331,68</b>	<b>7.946.072,22</b>	<b>8,15%</b>	<b>6,33%</b>	<b>102,54%</b>	<b>100,05%</b>
<b>Total termasuk PPh Migas</b>		<b>7.942.245,55</b>	<b>7.473.330,43</b>	<b>7.946.072,47</b>	<b>8,15%</b>	<b>6,33%</b>	<b>102,54%</b>	<b>100,05%</b>

Sumber: Apportal data tanggal 16 Januari 2025

(dalam jutaan rupiah)

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp7.473.330,43 juta dengan capaian sebesar 100,05% dari target APBN. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 6,33%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	91,86%	110,60%	102,54%	100,05%

Sumber: Laporan NKO dan aplikasi appportal

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan kenaikan target yang signifikan dari target 2023 sebesar Rp6,63 triliun menjadi Rp7,29 triliun pada tahun 2024.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,05%

Sumber: Laporan NKO dan aplikasi appportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi tercapainya kinerja penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 di antaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor.
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif.
3. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

## 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	100,05%

Sumber: Laporan NKO dan aplikasi appportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### ▪ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menghimbau Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu.
- b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan.
- c. Percepatan tindak lanjut DPP, DSPC, DSPT, DSPPN setiap triwulan.
- d. Percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus guna menunjang tercapainya target PKM.
- e. Melakukan analisis/bedah Wajib Pajak secara komprehensif.
- f. Optimalisasi kegiatan sita dan blokir.
- g. Optimalisasi kegiatan penilaian.

### ▪ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian target penerimaan pajak didorong oleh aktivitas ekonomi yang baik. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak mendorong aktivitas PPM, disamping itu optimalisasi tindakan penagihan aktif juga mendorong penerimaan pajak dari kegiatan PKM.

Secara keseluruhan capaian penerimaan pajak melebihi target yang ditentukan, namun tidak dengan target Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Capaian atas jenis pajak tersebut hanya sebesar 96,28% namun dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 4,35%. Hal ini diakibatkan karena target atas penerimaan dari PPN dan PPnBM yang terlampaui tinggi di tahun 2024, yaitu sebesar Rp5,36 triliun. Berbagai upaya telah dilakukan agar penerimaan dapat melampaui target, yaitu dengan cara melakukan analisis/bedah Wajib Pajak secara komprehensif dan optimal.

### ▪ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja penerimaan pajak seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. Mengoptimalkan sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan himbauan secara daring.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

### ▪ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus guna menunjang penerimaan dari kegiatan PKM, selain itu juga dilakukan optimalisasi kegiatan analisis/bedah Wajib Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Mengadakan In House Training penggalian potensi sektor pajak tertentu dengan peserta Account Representative.
- b. Melakukan Bedah Wajib Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kondisi ekonomi yang dinamis diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan.
- b. Perlambatan penerimaan sektor tertentu diatasi dengan melakukan himbauan secara masif.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana yang disusun untuk pencapaian target kinerja penerimaan pajak di tahun 2025 adalah:

- a. Melakukan manajemen restitusi.
- b. Optimalisasi kegiatan PPM.
- c. Percepatan penyelesaian atas pemeriksaan khusus.
- d. Melakukan analisis/bedah Wajib Pajak sektoral.
- e. Optimalisasi kegiatan sita dan blokir.
- f. Optimalisasi penilaian bisnis dan properti.
- g. Dinamisasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25.
- h. Melakukan kolaborasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil.

## IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

### 1. Pebandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	102,65	102,96	102,96	101,97	101,97	101,01	101,01
Capaian	102,65	102,96	102,96	101,97	101,97	101,01	101,01

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

#### a. Deskripsi SS

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

#### b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

c. Formula IKU

<b>Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:</b>																		
$( \text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\% ) + ( \text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\% )$																		
Komponen pertumbuhan nasional =																		
$\left( \frac{ ( 1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan} ) }{ ( 1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan} ) } \right) \times 100\%$																		
Komponen pertumbuhan unit kerja =																		
$( 1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan} ) \times 100\%$																		
$\left( \frac{ \text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan} }{ \text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu} } - 1 \right) \times 100\%$																		
Catatan Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:																		
<b>Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</b>																		
<b>Deviasi bulan =</b>	Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas	X100%																
	Proyeksi penerimaan kas																	
<b>Deviasi triwulan =</b>	$\frac{ \text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)} }{ 3 }$																	
<b>Deviasi s.d. triwulan n (tn) =</b>	$\frac{ \Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)} }{ n }$																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> <tr> <th>Range deviasi penerimaan kas</th> <th>Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deviasi ≤ 1,00%</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>1,00% &lt; Deviasi ≤ 4,00%</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>4,00% &lt; Deviasi ≤ 8,00%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>8,00% &lt; Deviasi ≤ 12,00%</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>12,00% &lt; Deviasi ≤ 16,00%</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Deviasi &gt; 16,00%</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>			Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	Deviasi ≤ 1,00%	120	1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110	4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100	8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90	12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80	Deviasi > 16,00%	70
Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																		
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																	
Deviasi ≤ 1,00%	120																	
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110																	
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100																	
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90																	
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80																	
Deviasi > 16,00%	70																	

d. Realisasi IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 101,01%. Nilai tersebut tercapai dari angka pertumbuhan pajak bruto organisasi sebesar 5,03% dan deviasi proyeksi sebesar 5,83%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	107,86%	97,59%	114,50%	101,01%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2023

dikarenakan kondisi ekonomi yang dinamis serta terdapat revisi target sehingga deviasi proyeksi perencanaan kas semakin sulit dikendalikan.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	100,00%	101,01%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi tercapainya kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 di antaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor.
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif.
3. Analisis proyeksi penerimaan yang komprehensif dan terus-menerus.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	100,00%	101,01%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan manajemen restitusi.
- b. Optimalisasi PPM.
- c. Analisis proyeksi penerimaan secara presisi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian target indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas didorong oleh aktivitas ekonomi yang baik. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak mendorong aktivitas PPM, sehingga pertumbuhan penerimaan bruto dapat lebih baik dari pertumbuhan bruto nasional 5,03% berbanding 5,02%.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. Mengoptimalkan kegiatan himbauan secara daring.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu manajemen restitusi, optimalisasi PPM, dan melakukan analisis proyeksi penerimaan secara teliti.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Manajemen restitusi.
- b. Optimalisasi kegiatan PPM.
- c. Analisis proyeksi penerimaan secara teliti.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kondisi ekonomi yang dinamis diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan.
- b. Perlambatan penerimaan sektor tertentu diatasi dengan melakukan himbauan secara masif.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana yang disusun untuk pencapaian target kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas di tahun 2025 adalah:

- a. Melakukan manajemen restitusi.
- b. Optimalisasi kegiatan PPM.
- c. Analisis proyeksi penerimaan secara teliti.

## Customer Perspective

### SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

#### IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

##### 1. Pebandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	26,00%	47,00%	47,00%	69,00%	69,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	18,29%	38,63%	38,63%	63,13%	63,13%	100,01%	100,01%
Capaian	70,35	82,19	82,19	91,49	91,49	100,01	100,01

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

##### a. Deskripsi SS

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

##### b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

##### c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100$$

##### d. Realisasi IKU

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 100,01%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	-	93,38%	109,79%	103,05%	100,01%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan kenaikan target penerimaan dari kegiatan PPM yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	-	-	-	100,00%	100,01%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi tercapainya kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan akhir Desember 2024 di antaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor.
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif.
3. Analisis proyeksi penerimaan yang komprehensif dan terus-menerus.

## 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	100,00%	100,00%	100,01%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### ▪ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan visit.
  - b. Penerbitan STP.
  - c. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan.
  - d. Melakukan himbauan dinamisasi PPh Pasal 25.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**  
Keberhasilan dalam pencapaian target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM didorong oleh aktivitas ekonomi yang baik. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak mendorong aktivitas PPM.
  - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
Capaian atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:
    - a. Mengoptimalkan kegiatan himbauan secara daring.
    - b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
  - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**  
Capaian atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu manajemen restitusi, optimalisasi PPM, dan analisis/bedah Wajib Pajak sektoral.
  - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**  
Realisasi atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
    - a. Manajemen restitusi.
    - b. Optimalisasi kegiatan PPM.
    - c. Analisis/bedah Wajib Pajak sektoral.
    - d. Melakukan himabuan dinamisasi PPh Pasal 25.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**  
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
    - a. Kondisi ekonomi yang dinamis diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan.
    - b. Perlambatan penerimaan sektor tertentu diatasi dengan melakukan himbauan secara masif.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana yang disusun untuk pencapaian target kinerja penerimaan pajak dari kegiatan PPM di tahun 2025 adalah:

- a. Melakukan manajemen restitusi.
- b. Optimalisasi kegiatan PPM.
- c. Percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus.
- d. Analisis/bedah Wajib Pajak sectoral.
- e. Himbauan dinamisasi PPh Pasal 25.

## IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	28,64%	115,26%	115,26%	119,10%	119,10%	119,88%	119,88%
Capaian	47,73	120,00	120,00	120,00	120,00	119,88	119,88

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

#### a. Deskripsi SS

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

#### b. Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak

mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Persentase realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 119,88%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	100,19%	100,00%	100,00%	119,88%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 naik dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan kesadaran Wajib Pajak yang semakin baik dan upaya himbauan yang dilakukan oleh organisasi berjalan dengan lancar.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	100,00%	119,88%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi tercapainya kinerja sampai dengan akhir Desember 2024 di antaranya:

1. Percepatan penyelesaian DSPT.
2. Sosialisasi secara masif.
3. Pengiriman himbauan kepada Wajib Pajak untuk penyampaian SPT Tahunan.
4. Pendampingan kepada Wajib Pajak yang mempunyai kendala dalam penyampaian SPT Tahunan.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,00%	119,88%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kegiatan pengawasan yang efektif.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**▪ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan visit.
- b. Penyuluhan one on one, one to many, dan lainnya.

**▪ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian target persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi didorong oleh

kesadaran Wajib Pajak yang meningkat dan kegiatan pendampingan penyampaian SPT Tahunan.

▪ **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. Mengoptimalkan himbauan penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

▪ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu optimalisasi kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan penyuluhan.

▪ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Mengadakan sosialisasi dengan tema penyampaian SPT Tahunan.
- b. Kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh.
- c. Rapat penyusunan/finalisasi materi penyuluhan.

▪ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu terdapat Wajib Pajak wajib SPT yang tidak ditemukan keberadaannya diatasi dengan usulan penggantian Wajib Pajak wajib SPT.

**6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana yang disusun untuk pencapaian target persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2025 adalah:

- a. Melakukan kegiatan pengawasan secara optimal.
- b. Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara efektif.

**SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

## SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

### IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	27,77%	28,85%	28,85%	47,74%	47,74%	100,53%	100,53%
Capaian	111,08	57,70	57,70	63,65	63,65	100,53	100,53

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

#### a. Deskripsi SS

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

#### b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

#### c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100$$

#### d. Realisasi IKU

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 100,53%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	-	66,00%	120,93%	96,02%	100,53%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2024 naik dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan optimalisasi kegiatan sita dan blokir yang telah dilakukan oleh organisasi dan kerja sama dengan PPN Kanwil DJP Jawa Timur II.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	-	-	-	100,00%	100,53%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM didukung oleh SDM yang kompeten sehingga kegiatan penagihan aktif dapat berjalan dengan efektif, begitu juga dengan penyelesaian kegiatan pemeriksaan yang dapat menunjang pencapaian target penerimaan pajak dari kegiatan PKM.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	100,00%	100,00%	100,53%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kegiatan penagihan aktif yang efektif.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan analisis/bedah Wajib Pajak.
- b. Melakukan visit.
- c. Penerbitan STP.
- d. Penerbitan SP2DK.

- e. Kolaborasi dengan PPNS.
- f. Usulan pemeriksaan.
- g. Optimalisasi kegiatan penagihan aktif.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM didorong oleh SDM yang kompeten dalam optimalisasi kegiatan penagihan aktif.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. Mengoptimalkan analisis Wajib Pajak sebelum melakukan kegiatan penagihan aktif.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu optimalisasi kegiatan penagihan aktif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Optimalisasi pemanfaatan data.
- b. Percepatan penyelesaian SP2DK outstanding.
- c. Melakukan kolaborasi dengan PPNS.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu terdapat Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan bayar utang pajak sehingga dilakukan kegiatan sita.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana yang disusun untuk pencapaian target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM di tahun 2025 adalah:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan data.
- b. SP2DK dipantau secara intensif.

- c. Percepatan penyelesaian SP2DK outstanding.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan kanwil.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP).
- f. Peningkatkan kegiatan kolaborasi dengan PPNS.
- g. Meningkatkan kegiatan sita dan blokir.
- h. Percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus.
- i. Menerbitkan himbauan berdasarkan data approweb yang belum ditindaklanjuti.

## Internal Process Perspective

### SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

#### IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

##### 1. Pebandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	77,70%	81,40%	81,40%	88,18%	88,18%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

##### a. Deskripsi SS

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

##### b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

## Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

## Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

## c. Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d. Realisasi IKU

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 88,80% dari target 74,00% sehingga capaian IKU 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan naik dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan kegiatan perencanaan sosialisasi dan penyuluhan yang lebih efektif.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Recana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	74,00%	88,80%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan didukung oleh SDM yang kompeten sehingga kegiatan edukasi berjalan dengan baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	74,00%	74,00%	88,80%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang efektif.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

  - a. Melaksanakan kelas pajak secara daring dan luring parameter tema 3 (perubahan perilaku).
  - b. Melaksanakan edukasi langsung aktif secara berkala.
  - c. Menyusun DSPT berdasarkan parameter WP bayar.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian target persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan didorong oleh SDM yang kompeten dalam menyusun strategi penyuluhan.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

  - a. Mengoptimalkan penyuluhan daring.
  - b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu penyusunan strategi penyuluhan secara komprehensif.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  - a. Penyuluhan langsung secara aktif.
  - b. Peningkatan kompetensi pegawai.
  - c. Peningkatan koordinasi antar fungsi edukasi dan pengawasan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu masih terdapat Wajib Pajak DSPT yang tidak menghadiri undangan sosialisasi sehingga dilakukan penggantian peserta sosialisasi.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan di tahun 2025 adalah:

- Penyuluhan langsung secara aktif Tema III One on One kepada WP DSPT Kolaboratif yang belum ditindaklanjuti.
- Peningkatan koordinasi antara Fungsi Edukasi dan Fungsi Pengawasan dalam menentukan sasaran kegiatan.
- Penyuluhan langsung secara aktif Tema III One to Many kepada kelompok WP yang sama sekali belum pernah menyampaikan suatu jenis SPT Masa dalam rangka perubahan perilaku lapor.

## IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

### 1. Pebandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	5,98%	6,00%	11,98%	6,00%	17,98%	91,78%	109,76%
Capaian	119,60	120,00	119,80	120,00	119,87	107,98	109,79

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

#### a. Deskripsi SS

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

#### b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU

Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 109,76%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	81,25%	92,62%	84,22%	109,76%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan naik dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan kegiatan perencanaan sosialisasi dan penyuluhan yang lebih efektif.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	100,00%	109,76%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan didukung oleh SDM yang kompeten sehingga kegiatan pelayanan dan penyuluhan berjalan dengan baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	100,00%	109,76%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kegiatan pelayanan dan penyuluhan yang efektif.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Melaksanakan Rapat Pembinaan Internal Seksi Pelayanan.
- Menyusun Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan KPP Madya Gresik.
- Menyampaikan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan KPP Madya Gresik kepada Kepala KPP Madya Gresik.
- Menyampaikan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan KPP Madya Gresik kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan penyuluhan didorong oleh SDM yang kompeten dalam menyusun strategi penyuluhan dan pelayanan.

▪ **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- Mengoptimalkan penyuluhan dan pelayanan secara daring.

- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu penyusunan strategi penyuluhan dan pelayanan secara komprehensif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Penyuluhan langsung secara aktif.
- b. Peningkatan kompetensi pegawai.
- c. Peningkatan koordinasi antar fungsi edukasi dan pengawasan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu masih terdapat perbedaan persepsi peraturan perpajakan antara pegawai dan Wajib Pajak sehingga dilakuka penyuluhan lebih mendalam lagi.

## **6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan di tahun 2025 adalah:

- a. Memasang QR Code berisi link kuesioner Survei Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Kehumasan, dan Efektivitas Penyuluhan Perpajakan di loket TPT serta Helpdesk.
- b. Menginformasikan kepada Wajib Pajak yang datang ke loket TPT serta Helpdesk terkait adanya Survei Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Kehumasan, dan Efektivitas Penyuluhan Perpajakan.
- c. Mengarahkan Wajib Pajak yang datang ke loket TPT serta Helpdesk untuk mengisi survei setelah selesai menerima pelayanan ataupun penyuluhan.

## SS Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif

### IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	115,58%	115,58%	113,88%	113,88%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

#### a. Deskripsi SS

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

#### b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

#### c. Formula IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	=	(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti × 40%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 × 30%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%)
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	=	(Kuantitas Penelitian × 40%) + (Kualitas Penelitian × 60%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\%$
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	=	(Kuantitas Penelitian × 60%) + (Kualitas Penelitian × 40%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left( \frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$

d. Realisasi IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 113,88% dari target 90,00% sehingga capaian IKU sebesar 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	-	100,00%	105,28%	118,94%	113,88%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan tingginya potensi keterlambatan tindak lanjut daftar nominatif (dafnom) pengawasan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	-	-	-	90,00%	113,88%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis didukung oleh SDM yang kompeten sehingga kegiatan pengawasan berjalan dengan baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90,00%	90,00%	113,88%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kegiatan pengawasan yang efektif.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

▪ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan monitoring ketersediaan data melalui approweb.

- b. Menerbitkan STP sesuai dengan dafnom.
- c. Melakukan dinamisasi sesuai dengan dafnom.
- d. Menindaklanjuti data matching tahun berjalan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis didorong oleh SDM yang kompeten dalam melakukan pengawasan Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. Mengoptimalkan analisis data sebelum melakukan kegiatan pengawasan lebih lanjut.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu analisis data tahun berjalan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Penerbitan STP sesuai dengan dafnom.
- b. Melakukan dinamisasi pajak sesuai dengan dafnom.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu tidak terdapat pemberitahuan pada aplikasi apabila ada penambahan dafnom STP maupun data pemicu sehingga pegawai diharuskan untuk mengecek secara berkala.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis di tahun 2025 adalah:

- a. Memantau data pada mandor-djp dan approweb.
- b. Memastikan semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan.

## SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

### IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

#### 1. Pebandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	90,00%	90,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

#### a. Deskripsi SS

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

#### b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%).

c. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis = (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)	
<b>Maksimal 120%</b>	
Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 _____ x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis <b>Maksimal 120%</b>
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis _____ x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis <b>Maksimal 120%</b>

d. Realisasi IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 120,00% dari target 100,00% sehingga capaian IKU sebesar 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	-	120,00%	120,00%	119,33%	120,00%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis naik dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan tindak lanjut SP2DK semakin optimal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Recana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	-	-	-	100,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis didukung oleh SDM yang kompeten sehingga kegiatan pengawasan berjalan dengan baik.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	100,00%	113,88%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kegiatan pengawasan yang efektif.

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

  - a. Percepatan penyelesaian DPP.
  - b. Percepatan penyelesaian SP2DK outstanding.
  
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis didorong oleh SDM yang kompeten dalam melakukan pengawasan Wajib Pajak.
  
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

  - a. Mengoptimalkan analisis data sebelum melakukan kegiatan pengawasan lebih lanjut.
  - b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
  
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu analisis data yang optimal dan komprehensif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Percepatan penyelesaian DPP.
- b. Percepatan penyelesaian SP2DK outstanding.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu SP2DK yang telah terbit tidak langsung dibayar oleh Wajib Pajak sehingga solusi yang dilakukan yaitu melakukan pendampingan kepada Wajib Pajak tersebut.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis di tahun 2025 adalah:

- a. Percepatan penyelesaian P4DK.
- b. Percepatan penyelesaian SP2DK outstanding.

## IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	116,60%	116,60%	117,59%	117,59%	119,95%	119,95%
Capaian	120,00	116,60%	116,60%	117,59%	117,59%	119,95%	119,95%

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

#### a. Deskripsi SS

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

#### b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

## 1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
  - 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  - 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
  - 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  - 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  - 5) Daftar 42ominative STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
  - 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
    - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
  - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

c. Formula IKU

<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$
<b>Pemanfaatan Data STP :</b>
$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$
<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan} \times 100\%$

d. Realisasi IKU

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 119,95% dari target 100,00% sehingga capaian IKU sebesar 119,95.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120,00%	119,95%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan naik dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan kualitas data pemicu yang tersedia baik.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	100,00%	119,95%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan didukung oleh SDM yang kompeten sehingga kegiatan pengawasan berjalan dengan baik.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100,00%	100,00%	119,95%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kegiatan pengawasan yang efektif.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. Upaya yang telah dilakukan yaitu Data Pemicu selain tahun berjalan dipergunakan didalam kertas kerja penelitian untuk Wajib Pajak yang termasuk ke dalam DPP.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**  
Keberhasilan dalam pencapaian Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan didorong oleh SDM yang kompeten dalam melakukan pengawasan Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. Mengoptimalkan analisis data sebelum melakukan kegiatan pengawasan lebih lanjut.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu analisis data yang optimal dan komprehensif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Data Pemicu selain tahun berjalan dipergunakan didalam kertas kerja penelitian untuk Wajib Pajak yang termasuk ke dalam DPP.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu Data yang harus ditindaklanjuti sangat banyak namun penerbitan DPP terbatas sehingga dilakukan optimalisasi penyelesaian kegiatan tersebut.

## **6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan di tahun 2025 adalah:

- a. Tindak lanjut Pemanfaatan data selain tahun pajak berjalan akan dilaksanakan berdasarkan data pemicu yang tersedia di Approweb. Terhadap WP yang tidak masuk ke dalam DPP, maka akan ditindaklanjuti melalui mekanisme WRA (Wider Revenue Activity).

## **IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

### **1. Pebandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Yearly</b>
<i>Target</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Realisasi</i>	120,00%	114,77%	114,77%	87,39%	87,39%	102,56%	102,56%
<i>Capaian</i>	120,00%	114,77%	114,77%	87,39%	87,39%	102,56%	102,56%

*Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025*

#### **a. Deskripsi SS**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

#### **b. Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

#### **c. Formula IKU**

<b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b> = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
<b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b> = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
<b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b> = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

#### **d. Realisasi IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 102,56%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	102,56%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 sebesar 102,56%.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	100,00%	102,56%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu didukung oleh SDM yang kompeten.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	100,00%	102,56%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Persentase Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan rapat komite kepatuhan secara berkala.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu didorong oleh SDM yang kompeten dalam melakukan pengawasan Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. Mengoptimalkan analisis data sebelum melakukan kegiatan pengawasan lebih lanjut.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu rapat secara berkala.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan rapat secara berkala dan membuat laporan rapat sebelum jangka waktu yang ditetapkan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu padatnya kegiatan sehingga rapat komite kepatuhan ditentukan jadwalnya secara tetap.

## **6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu di tahun 2025 adalah:

- a. Rapat komite kepatuhan secara berkala.
- b. Pembahasan pembuatan laporan komite kepatuhan sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan.
- c. Penyampaian laporan komite kepatuhan tepat waktu.

## SS Penegakan hukum yang efektif

### IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	104.92%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	104.92	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

##### a. Deskripsi SS

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

##### b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

##### c. Formula IKU

$(\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian} \times 60\%) +$   
 $(\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu} \times 40\%)$

##### d. Realisasi IKU

Persentase Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 120,00% dari target 100,00% sehingga capaian IKU sebesar 120,00.

#### 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	93,01%	112,97%	108,01%	120,00%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian naik dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan sinergi satuan tugas pemeriksa semakin baik.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Recana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	100,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian didukung oleh SDM yang kompeten sehingga kegiatan pemeriksaan dan penilaian berjalan dengan baik.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	100,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kecukupan bahan baku pemeriksaan.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
 Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah dilakukan antara lain:
  - a. Usul Pemeriksaan WP Prioritas
  - b. Memperkuat sinergi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama, dan Tim Joint Audit
  - c. Memastikan kecukupan kebutuhan bahan baku pemeriksaan tahun 2024
  - d. Melakukan manajemen pemeriksaan SPT lebih bayar restitusi
  - e. Mengoptimalkan persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pemeriksaan
  - f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemeriksaan dan penilaian
  - g. Optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan pemeriksaan
  - h. Optimalisasi sinergi antara pengawasan/pemeriksaan dengan penilaian dalam hal permintaan bantuan penilaian atau penilai sebagai tenaga ahli.
  
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**  
 Keberhasilan dalam pencapaian tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian didorong oleh peningkatan kualitas SDM sehingga memiliki kompetensi yang bagus dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan penilaian.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. Mengoptimalkan analisis data sebelum melakukan kegiatan pemeriksaan dan penilaian lebih lanjut.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu analisis data yang optimal dan komprehensif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Memastikan kecukupan kebutuhan bahan baku pemeriksaan tahun 2024.
- b. Melakukan manajemen pemeriksaan SPT lebih bayar restitusi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu tingkat restitusi yang cukup besar sehingga solusi yang dilakukan yaitu melakukan manajemen restitusi.

## **6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di tahun 2025 adalah:

- a. Pengujian Kepatuhan melalui pemeriksaan khusus atas WP Sektor Nasional/Kanwil yang 4-5 tahun tidak dilakukan pemeriksaan.
- b. Partisipasi aktif Joint Audit jika ada penugasan dari eksternal.
- c. Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan Khusus dari Saldo Tunggakan tahun sebelumnya
- d. Usul pemeriksaan Post Audit atas WP yang telah mengajukan Pengembalian Pendahuluan, Usul Pemeriksaan WP SPT RTLB.
- e. Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan Rutin/Manajemen Restitusi untuk menghasilkan Refund Discrepancy yang optimal.
- f. Pengadministrasian dan Digitalisasi Dokumen Pemeriksaan.
- g. Peer review secara berkelanjutan.
- h. Partisipasi aktif dan Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai Pajak.
- i. Pengawasan kegiatan input progress pemeriksaan pada Aplikasi Pemeriksaan.

- j. Mengoptimalkan jumlah bahan baku penilaian melalui data yang tersedia seperti data PPhTB, melakukan koordinasi dengan Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita Pajak Negara.
- k. Melakukan kolaborasi dengan tim penilai Kanwil.

## **IKU Tingkat efektivitas penagihan**

### **1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Yearly</b>
<i>Target</i>	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
<i>Realisasi</i>	41,95%	74,01%	74,01%	96,21%	96,21%	112,40%	112,40%
<i>Capaian</i>	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

*Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025*

#### **a. Deskripsi SS**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

#### **b. Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

#### **c. Formula IKU**

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

#### **d. Realisasi IKU**

Persentase Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 112,40% dari target 75,00% sehingga capaian IKU sebesar 120,00.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	116,78%	117,43%	113,62%	112,40%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan bahan baku penagihan yang semakin menurun.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Recana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	-	75,00%	112,40%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Tingkat efektivitas penagihan didukung oleh SDM yang kompeten sehingga kegiatan penagihan berjalan dengan baik.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	75,00%	112,40%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kecukupan bahan baku penagihan.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Optimalisasi Kegiatan Hard Collections.
- Optimalisasi Kegiatan Soft Collections.
- Pemenuhan IKU Tematik Kegiatan Penagihan Aktif.
- Optimalisasi Kegiatan Joint Collection.
- Optimalisasi DSPC.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian Tingkat efektivitas penagihan didorong oleh peningkatan kualitas SDM sehingga memiliki kompetensi yang bagus dalam melakukan kegiatan penagihan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas penagihan seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. Mengoptimalkan analisis data sebelum melakukan kegiatan penagihan lebih lanjut.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu analisis data yang optimal dan komprehensif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Memastikan kecukupan kebutuhan bahan penagihan tahun 2024.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM penagihan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Tingkat efektivitas penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu Ketersediaan Data Rekening WP/PP yang belum up to date sehingga solusi yang dilakukan yaitu melakukan pencarian data dan analisis data terlebih dahulu.

## **6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Tingkat efektivitas penagihan di tahun 2025 adalah:

- a. Melanjutkan kegiatan Hard Collection secara optimal.
- b. Melanjutkan kegiatan Soft Collection secara optimal.
- c. Melanjutkan kegiatan Penagihan Aktif secara Tematik.
- d. Kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam rangka percepatan pencairan tunggakan pajak.

## IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

### 1. Pebandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%
Capaian	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

#### a. Deskripsi SS

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

#### b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan."

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100$$

d. Realisasi IKU

Persentase Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 200,00% dari target 100,00% sehingga capaian IKU sebesar 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200,00%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Recana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100,00%	200,00%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan didukung oleh SDM yang kompeten sehingga penyampaian usul pemeriksaan berjalan dengan baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	200,00

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kecukupan bahan usulan pemeriksaan.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### ▪ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah dilakukan yaitu mengusulkan 2 wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

### ▪ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan didorong oleh peningkatan kualitas SDM sehingga memiliki kompetensi yang bagus dalam melakukan analisis data untuk diajukan usulan pemeriksaan.

### ▪ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. Mengoptimalkan analisis data sebelum melakukan kegiatan penyampaian usulan pemeriksaan.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

### ▪ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu analisis data yang optimal dan komprehensif.

### ▪ Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Mencari wajib pajak yang memiliki indikasi tindak pidana perpajakan dengan kemampuan bayar tinggi dan aset yang cukup.

### ▪ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu ketersediaan data yang terbatas sehingga solusi yang dilakukan yaitu melakukan pencarian data dan analisis data lebih intensif.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di tahun 2025 adalah Mencari wajib pajak yang memiliki indikasi tindak pidana perpajakan dengan kemampuan bayar tinggi dan aset yang cukup.

### SS Data dan informasi yang berkualitas

#### IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	26,48%	73,75%	73,75%	74,00%	74,00	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	92,50	92,50	120,00	120,00

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

##### a. Deskripsi SS

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

##### b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

##### c. Formula IKU

<b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
<b>2. Produksi Alat Keterangan</b>
$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$

##### d. Realisasi IKU

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 120,00% dari target 100,00% sehingga capaian IKU sebesar 120,00.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	-	120,00%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	100,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan didukung oleh SDM yang kompeten sehingga kegiatan pengamatan dan produksi alat keterangan berjalan dengan baik.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	100,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kegiatan pengamatan dan produksi alat keterangan yang efektif.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan visit.
- b. Melakukan pengamatan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan didorong oleh SDM yang kompeten dalam melakukan pengamatan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. Mengoptimalkan analisis data sebelum melakukan kegiatan pengamatan lebih lanjut.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu visit dan pengamatan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Melakukan visit.
- b. Melakukan pengamatan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu tidak ditemukan data lapangan sehingga dikaji ulang data yang tersedia dan memperluas sasaran pengamatan.

## **6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan di tahun 2025 adalah:

- a. Melakukan visit.
- b. Melakukan pengamatan.

## Learning & Growth Perspective

### SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

#### IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,47	117,47
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,47	117,47

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

##### a. Deskripsi SS

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

##### b. Definisi IKU

###### Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 aspek, yaitu:

##### 1. Aspek 1: Kualitas Kompetensi Pejabat

Kualitas kompetensi pejabat diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial-kultural pejabat struktural serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial-kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi, sedangkan kompetensi sosial-kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial-kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 70%:** secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung.
- 20%:** coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain.
- 10%:** belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas.

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut-off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial-kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026).
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru.

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial-kultural pada tahun 2024.

## 2. **Aspek 2: Kualitas Kompetensi Pelaksana dan Fungsional**

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial-kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024.
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024.
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

b. Bagi Pejabat Pengawas:

3. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis.

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi, maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- Tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024.
- Seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

### 3. Aspek 3: Pengembangan Kompetensi Pegawai

Pengembangan kompetensi pegawai diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non-klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 menit yang setara dengan 1 poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui Open Access di KLC dihitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah **24 poin JP**.

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen.
2. Pengenalan Dasar P3B.
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation).
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000.
5. Compliance Risk Management.
6. AR Pengawasan.
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1).
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP).
10. Pengelolaan Kinerja.
11. Komunikasi Efektif.
12. Berpikir Kreatif.
13. Interpersonal Skill.
14. Mengelola Stres dan Tekanan.
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan.
16. Tim yang Efektif.
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP.
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis.
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan.
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak.
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
24. Exchange of Information on Request.
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan.
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin.
2. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin.
3. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin.

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

1. CPNS yang baru diangkat.
2. Pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain.

3. Pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP.

Yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin. Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

**Standar Poin Pemenuhan Jam Pelajaran** untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pejabat Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Pimpinan Tinggi	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)

**Komponen 2:** Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM: Implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan melalui program kebintalan yang mencerminkan empat bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan untuk membentuk pegawai yang memiliki jiwa nasionalisme, integritas, unggul, serta kesehatan fisik dan mental yang optimal sesuai KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- c. Formula IKU

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

- d. Realisasi IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 117,47% dari target 100,00% sehingga capaian IKU sebesar 117,47.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,47%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	100,00%	117,47%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM didukung oleh perencanaan kegiatan kebingtalan dan pemenuhan kompetensi yang baik.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	100,00%	117,47%

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan perencanaan kegiatan kebingtalan yang efektif.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah dilakukan yaitu melaksanakan kegiatan kebingtalan terdiri dari bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sinkronisasi kegiatan Internalisasi Corporate Value (ICV) dan pendamping lainnya seperti In House Training (IHT).

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM didorong oleh perencanaan kegiatan yang baik.

▪ **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- c. Melakukan perencanaan kegiatan dengan baik.
- d. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu himbauan pelaksanaan e-learning.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Menyusun perencanaan kegiatan kebintalan dengan baik.
- Menghimbau kepada pegawai lain untuk mengikuti e-learning dan/atau IHT.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu padatnya jadwal sehingga kegiatan kebintalan sulit dilakukan sehingga ditemukan solusi bahwa kegiatan kebintalan dilaksanakan dengan kegiatan lain.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM di tahun 2025 adalah:

- Menyusun perencanaan kegiatan kebintalan.
- Membuat pengingat pelaksanaan e-learning.

## IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

### 1. Pebandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	-	-	-	100,00	100,00	93,74	93,74
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	110,28	110,28

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

#### a. Deskripsi SS

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

c. Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

d. Realisasi IKU

Indeks Penilaian Integritas Unit tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 93,74.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	93,74

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Recana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85 (skala 100)	93,74

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit didukung oleh kegiatan profiling pegawai secara teliti dan akurat.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85 (skala 100)	85 (skala 100)	93,74

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan perencanaan Internalisasi Corporate Value (ICV) yang baik.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### ▪ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah dilakukan yaitu melaksanakan kegiatan Internalisasi Corporate Value (ICV) dan pendamping lainnya seperti In House Training (IHT).

### ▪ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian Indeks Penilaian Integritas Unit didorong oleh perencanaan kegiatan ICV yang baik.

### ▪ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan ICV dengan baik.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

### ▪ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu ICV, profiling pegawai, dan memfasilitasi pegawai untuk memberikan masukan dan saran.

### ▪ Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan ICV dengan baik.
- b. Melakukan profiling kepada pegawai yang belum pernah dilakukan profiling.

### ▪ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu padatnya jadwal sehingga kegiatan ICV maupun pemantauan sulit dilakukan sehingga ditemukan solusi bahwa kegiatan ICV dilaksanakan dengan kegiatan lain.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Indeks Penilaian Integritas Unit di tahun 2025 adalah:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan ICV.
- b. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai.

## IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	24,56	84,95	84,95	86,87	86,87	100,00	100,00
Capaian	106,78	120,00	120,00	120,00	120,00	111,11	111,11

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

#### a. Deskripsi SS

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### b. Definisi IKU

##### Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam

mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

### Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- d. Realisasi IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 100,00.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	100,00

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	90,00	100,00

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko didukung oleh kegiatan himbauan terkait manajemen kinerja yang baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	90,00	100,00

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko yang baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Upaya yang telah dilakukan yaitu menyusun profil risiko yang akurat dan menentukan rencana aksi mitigasi risiko yang baik.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko didorong oleh penyusunan profil risiko yang akurat.

▪ **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan manajemen risiko dan manajemen kinerja dengan baik.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu melaksanakan manajemen kinerja yang terintegrasi dengan manajemen risiko.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Menyusun profil risiko secara teliti.
- Melaksanakan rapat koordinasi penentuan risiko.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu kegiatan manajemen risiko seringkali diartikan sebagai kegiatan yang tidak diutamakan sehingga solusi yang didapat adalah mengintegrasikan kegiatan manajemen kinerja dengan manajemen risiko.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko di tahun 2025 adalah:

- Menyusun profil risiko dengan akurat.
- Menentukan rencana aksi atas risiko yang dilakukan mitigasi.

## SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

### IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

#### 1. Pebandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	76,02	105,26	105,26	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	76,02	105,26	105,26	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi SS

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c. Formula IKU

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			
<b>Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:</b>			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		
<p>*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)</p> <p>** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)</p>			
<b>Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:</b>			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$		
100	Realisasi NKA = 91		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$		
80	Realisasi NKA = 80		
79,9	Realisasi NKA < 80		
<p>* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)</p> <p>** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)</p>			

d. Realisasi IKU

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggarantercapai dengan baik di 2024 yaitu sebesar 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	120,00

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Target Tahun 2024 – Renja DJP	Target Tahun 2024 – Renstra DJP	Target Tahun 2024 – RPJMN	Target Tahun 2024 – PK	Realisasi 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100,00	120,00

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran didukung oleh perencanaan anggaran yang baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	100,00	120,00

Sumber: mandor-djp data tanggal 16 Januari 2025

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan pelaksanaan anggaran yang baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan *forecasting* anggaran secara teliti.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**  
Keberhasilan dalam pencapaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran didorong oleh tim keuangan yang berkompeten.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran seiring dengan efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:
  - a. Melakukan rapat bersama tim keuangan dengan baik.
  - b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan yaitu melaksanakan menyusun alokasi belanja secara akurat.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Memastikan setiap indikator pada penilaian IKPA mendapat nilai maksimal khususnya pada indikator Deviasi halaman III DIPA (RPD). Selain itu terkait target penyerapan anggaran yang menggunakan rata-rata tertimbang dengan memperhatikan proporsi pagu pada masing-masing belanja harus diperhitungkan dengan cermat khususnya terkait belanja 51 (Belanja Pegawai) dimana target penyerapan sampai dengan akhir tahun harus minimal 95% sehingga perlu ketelitian dan keakuratan dalam penyusunan alokasi belanja pegawai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu sangat susah untuk menyusun alokasi anggaran sehingga dilakukan rapat tim keuangan secara itens agar alokasi anggaran dapat terbagi dengan baik.

## **6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana yang disusun untuk pencapaian target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2025 adalah Memastikan setiap indikator pada penilaian IKPA mendapat nilai maksimal khususnya pada indicator Deviasi halaman III DIPA (RPD). Selain itu terkait target penyerapan anggaran yang menggunakan rata-rata tertimbang dengan memperhatikan proporsi pagu pada masing-masing belanja harus diperhitungkan dengan cermat khususnya terkait belanja 51 (Belanja Pegawai) dimana target penyerapan sampai dengan akhir tahun harus minimal 95% sehingga perlu ketelitian dan keakuratan dalam penyusunan alokasi belanja pegawai.

## REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, dilakukan melalui penentuan kebijaksanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan. Pada tahun 2024, DIPA yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Gresik sebesar Rp7.222.697,- dengan realisasi penyerapan anggaran untuk semua jenis belanja sebesar Rp7.102.001.396,- atau mencapai 98 % dari DIPA yang ada.

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Pendapatan Negara Dan Hibah</b>	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
<b>I. Pendapatan Perpajakan</b>	8.779.317.625.000,	7.003.752.957.692,	(1.775.564.667.308,)	80	7.288.150.181.000,	7.470.973.594.300,	(182.823.413.300,)	103,
1. Pajak Dalam Negeri	8.779.317.625.000,	7.003.752.957.692,	(1.775.564.667.308,)	80	7.288.150.181.000,	7.470.973.594.300,	(182.823.413.300,)	103,
2. Pajak Perdagangan Internasional	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
<b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	9.650.000,	66.380.000,	56.730.000,	688	0,	15.359.687,	(15.359.687,)	0,
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
3. Pendapatan BLU	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	9.650.000,	66.380.000,	56.730.000,	688	0,	15.359.687,	(15.359.687,)	0,
<b>III. Pendapatan Hibah</b>	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)</b>	8.779.327.275.000,	7.003.819.337.692,	(1.775.507.937.308,)	80	7.288.150.181.000,	7.470.988.953.987,	(182.838.772.987,)	103,
<b>B. Belanja Negara</b>	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	7.222.697.000,	7.102.001.396,	(120.695.604,)	98	6.625.042.000,	6.511.769.655,	113.272.345,	98,
1. Belanja Pegawai	987.087.000,	951.687.000,	(35.400.000,)	96	968.357.000,	915.934.000,	52.423.000,	95,
2. Belanja Barang	6.045.560.000,	5.960.464.896,	(85.095.104,)	99	5.656.685.000,	5.595.835.655,	60.849.345,	99,
3. Belanja Modal	190.050.000,	189.849.500,	(200.500,)	100	0,	0,	0,	0,
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
5. Belanja Subsidi	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
6. Belanja Hibah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
7. Belanja Bantuan Sosial	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
8. Belanja Lain-lain	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
<b>II. Transfer ke Daerah</b>	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
1. Dana Bagi Hasil	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Dana Alokasi Umum	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
3. Dana Transfer Khusus	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
c. Hibah Kepada Daerah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
4. Dana Otonomi Khusus	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
6. Dana Desa	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
7. Insentif Fiskal	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	7.222.697.000,	7.102.001.396,	(120.695.604,)	98	6.625.042.000,	6.511.769.655,	113.272.345,	98,
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,

## **EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Kegiatan efisiensi dilakukan oleh organisasi guna pencapaian target yang lebih efektif dan baik. Kegiatan efisiensi yang dilakukan yaitu kegiatan efisiensi anggaran belanja organisasi. Anggaran belanja organisasi dihitung berdasarkan kebutuhan organisasi secara triwulan kedepan sehingga harus dilakukan dengan melihat data historis agar kegiatan forecasting lebih akurat. Kegiatan efisiensi anggaran perlu dilakukan selain sebagai komitmen pimpinan juga merupakan komponen penilaian kinerja anggaran yang tercantum dalam IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

## **KINERJA LAIN-LAIN**

Selama tahun 2024, organisasi mencatatkan Nilai Kinerja Organisasi dengan predikat istimewa (109,60 pada akhir tahun 2024). Selain hal tersebut, KPP Madya Gresik juga mendapatkan beberapa penghargaan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Jawa Timur II, diantaranya adalah:

1. Satuan Kerja dengan Capaian IKU IKA Terbaik Kedua Tahun Anggaran 2024.
2. Satuan Kerja dengan Penyampaian Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Terresponsif Kedua Tahun 2024.
3. Satuan Kerja dengan Tingkat Pengelolaan BMN Terbaik Ketiga Subkategori Penetapan Status Penggunaan BMN Tahun 2024.
4. Satuan Kerja dengan Akurasi Realisasi Penerimaan Dibanding Komitmen Terbaik Ketiga Tahun 2024.
5. Satuan Kerja dengan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) Strategis Terbaik Ketiga Tahun 2024.
6. Satuan Kerja dengan Usulan Bantuan Penilaian Terbaik Kedua Tahun 2024.
7. Satuan Kerja dengan Capaian Kinerja Penagihan Terbaik Ketiga Tahun 2024.
8. Satuan Kerja dengan Capaian Tingkat Efektivitas Tindakan Penagihan Terbaik Kesatu Tahun 2024.
9. Satuan Kerja dengan Capaian Tingkat Kegiatan Penyitaan Terbanyak Kesatu Tahun 2024.
10. Satuan Kerja dengan Jumlah Blokir Terbanyak Kedua Tahun 2024.
11. Satuan Kerja dengan Realisasi Tindak Lanjut Diseminasi Lembar Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP) Terbaik Ketiga Tahun 2024.
12. Satuan Kerja dengan Kolaborasi Penegakan Hukum Pembayaran Terbanyak Ketiga Tahun 2024.
13. Satuan Kerja dengan Pengelolaan Media Sosial Terbaik Kesatu Tahun 2024.
14. Satuan Kerja dengan Pengiriman Permohonan Keberatan dan Non Keberatan Tercepat Kesatu Tahun 2024.

Penghargaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II dalam Nomor KEP-53/WPJ.24/2025 tentang Penetapan Penghargaan Satuan Kerja Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II atas Kinerja Tahun 2024.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, organisasi dapat mencapai target kinerja dengan baik pada tahun 2024 dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 109,60 dan dengan predikat ISTIMEWA. Penerimaan pajak sebagai tugas utama organisasi juga dapat tercapai sebesar 100,05% dari target Rp7.942.245.550.000,00. Hal ini menandakan keseriusan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk ikut andil dalam pelaksanaan negara.

Tentunya dalam mencapai target kinerja, tidak sedikit kendala yang dihadapi oleh organisasi, namun berkat kompetensi SDM yang baik dan sinergi antar lini yang berjalan dengan lancar, maka hambatan dan kendala dapat dilewati dengan baik. Efisiensi sumber daya yang utamanya anggaran juga terlaksana agar pencapaian target dapat terkontrol dan berfokus pada tujuan utama.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para mitra, tim, dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi secara signifikan membantu organisasi untuk mencapai tujuan di tahun 2024. Prestasi yang kami raih tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan pajak yang lebih baik bagi masyarakat dan negara.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun dengan harapan untuk memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh organisasi serta hambatan yang dihadapi untuk mencapai target kinerja tahun 2024.

# LAMPIRAN

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA PERIODE 31 DESEMBER 2024

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
ESELON I : DITJEN PAJAK 04  
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA GRESIK 604421

Tgl Data : 24/01/25 12:57 PM  
Tgl Cetak : 28/01/25 9:40 PM  
Halaman : 2  
lap\_ira\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>7,222,697,000</b>	<b>7,102,001,396</b>	<b>(120,695,604)</b>	<b>98</b>	<b>6,625,042,000</b>	<b>6,511,769,655</b>	<b>113,272,345</b>	<b>98</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :  
FINAL

GRESIK, 28 Januari 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUJASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG SUMARYAWAN, S.E., M.T.  
NIP.197401211994021002

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
ESELON I : DITJEN PAJAK 04  
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA GRESIK 604421

Tgl Data : 24/01/25 12:57 PM  
Tgl Cetak : 28/01/25 9:40 PM  
Halaman : 1  
lap\_ira\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Pendapatan Negara Dan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Pendapatan Perpajakan</b>	<b>8,779,317,625,000</b>	<b>7,003,752,957,692</b>	<b>(1,775,564,667,308)</b>	<b>80</b>	<b>7,288,150,181,000</b>	<b>7,470,973,594,300</b>	<b>(182,823,413,300)</b>	<b>103</b>
1. Pajak Dalam Negeri	8,779,317,625,000	7,003,752,957,692	(1,775,564,667,308)	80	7,288,150,181,000	7,470,973,594,300	(182,823,413,300)	103
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>9,650,000</b>	<b>66,380,000</b>	<b>56,730,000</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>15,359,687</b>	<b>(15,359,687)</b>	<b>0</b>
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	9,650,000	66,380,000	56,730,000	688	0	15,359,687	(15,359,687)	0
<b>III. Pendapatan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)</b>	<b>8,779,327,275,000</b>	<b>7,003,819,337,692</b>	<b>(1,775,507,937,308)</b>	<b>80</b>	<b>7,288,150,181,000</b>	<b>7,470,988,953,987</b>	<b>(182,838,772,987)</b>	<b>103</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>7,222,697,000</b>	<b>7,102,001,396</b>	<b>(120,695,604)</b>	<b>98</b>	<b>6,625,042,000</b>	<b>6,511,769,655</b>	<b>113,272,345</b>	<b>98</b>
1. Belanja Pegawai	987,087,000	951,687,000	(35,400,000)	96	968,357,000	915,934,000	52,423,000	95
2. Belanja Barang	6,045,560,000	5,960,464,896	(85,095,104)	99	5,656,685,000	5,595,835,655	60,849,345	99
3. Belanja Modal	190,050,000	189,849,500	(200,500)	100	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Transfer ke Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

# KEPUTUSAN KEPALA KANWIL DJP JAWA TIMUR II TENTANG PENGHARGAAN KINERJA TAHUN 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAWA TIMUR II  
NOMOR KEP-53/WPJ.24/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGHARGAAN SATUAN KERJA TERBAIK DI LINGKUNGAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II ATAS  
KINERJA TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAWA TIMUR II,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud apresiasi atas kerja keras dan dedikasi Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II dalam kinerja sepanjang tahun 2024, perlu diberikan penghargaan kepada Satuan Kerja yang berkinerja terbaik, baik yang berkaitan dengan proses bisnis inti maupun proses bisnis pendukung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II tentang Penetapan Penghargaan Satuan Kerja Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II atas Kinerja Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 395/KM.1/2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II TENTANG PENETAPAN PENGHARGAAN SATUAN KERJA TERBAIK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II ATAS KINERJA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penghargaan kepada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II atas kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II ini.
- KEDUA : Hasil penilaian atas kinerja tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam memberikan piagam penghargaan.
- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
3. Kepala Bagian dan/atau Bidang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II terkait; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II terkait.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 16 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II,



Ditandatangani secara elektronik  
AGUSTIN VITA AVANTIN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II  
 NOMOR KEP-53/WPJ.24/2025 TENTANG  
 PENETAPAN PENGHARGAAN SATUAN KERJA  
 TERBAIK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II  
 ATAS KINERJA TAHUN 2024

**DAFTAR PENERIMAAN PENGHARGAAN SATUAN KERJA TERBAIK DI LINGKUNGAN  
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II ATAS  
 KINERJA TAHUN 2024**

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
1	Satuan Kerja dengan Partisipasi Kegiatan SiBanter Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Barat 2. KPP Madya Sidoarjo 3. KPP Pratama Sidoarjo Selatan	Jumlah partisipasi kegiatan SiBanter terbanyak selama tahun 2024
2	Satuan Kerja dengan Ketertiban Pegawai Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Barat 2. KPP Pratama Sidoarjo Selatan 3. KPP Pratama Ngawi	Jumlah Pelanggaran Jam Kerja pada Tahun 2024 Paling Sedikit
3	Satuan Kerja dengan Implementasi Imbauan Manajemen Kinerja Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Lamongan 2. KPP Pratama Madiun 3. KPP Pratama Sidoarjo Selatan	Kecepatan Penyampaian Laporan Tiap Triwulan, Ketepatan Penyampaian Laporan Tiap Triwulan, Kesesuaian Materi Yang Disampaikan, Kesesuaian Format Laporan
4	Satuan Kerja dengan Penyerapan Anggaran Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Barat 2. KPP Pratama Sidoarjo Selatan 3. KPP Madya Sidoarjo	Persentase realisasi penyerapan pada DIPA Satuan Kerja
5	Satuan Kerja dengan Capaian IKU IKA Terbaik Tahun Anggaran 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Madya Gresik 3. KPP Pratama Lamongan	Capaian IKU IKA Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan rata-rata deviasi kumulatif RPD, jumlah kontrak pengadaan, dan jumlah penggunaan KKP
6	Satuan Kerja dengan Laporan Pembayaran dan Pertanggungjawaban (LPP) Tunjangan Kinerja Terbaik Tahun Anggaran 2023	1. KPP Pratama Lamongan 2. KPP Pratama Ngawi 3. KPP Pratama Jombang	1. Aspek Pengujian Kesesuaian Saldo Dana Tunjangan Kinerja 2. Aspek Pengujian Dropping Tunjangan Kinerja

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
			3. Aspek Pengujian Pembayaran Pajak PPh Pasal 21 4. Aspek Pengujian Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja 5. Aspek Bobot Kesalahan Dokumen
7	Satuan Kerja dengan Pemantauan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Utara 2. KPP Pratama Sidoarjo Barat 3. KPP Madya Sidoarjo	Hasil Pemantauan PPG Tahun 2024 pada Aplikasi SIAGA
8	Satuan Kerja dengan Penyampaian Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Teresponsif Tahun 2024	1. KPP Pratama Pamekasan 2. KPP Madya Gresik 3. KPP Pratama Madiun	Kecepatan dan kesesuaian laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang disampaikan Tahun 2024
9	Satuan Kerja dengan Tingkat Penyelesaian Sensus BMN Teresponsif Tahun 2024	1. KPP Pratama Ngawi 2. KPP Pratama Gresik 3. KPP Pratama Madiun	Dihitung dari waktu penyelesaian Sensus BMN
10	Satuan Kerja dengan Tingkat Pengelolaan BMN Terbaik Subkategori Penetapan Status Penggunaan BMN Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Utara 2. KPP Pratama Gresik 3. KPP Madya Gresik	Realisasi Jumlah aset yang sudah diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN
11	Satuan Kerja dengan Pengelolaan Ruang Server Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Pratama Lamongan 3. KPP Pratama Sidoarjo Utara	1. Kondisi Panel Listrik 2. Kondisi Kerapian Kabel Jaringan 3. Kebersihan Ruang Server 4. Kondisi Grounding Listrik 5. Kondisi Lampu Penerangan 6. Posisi Pendingin Ruangan
12	Satuan Kerja dengan Capaian Penghimpunan Data ILAP Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Bojonegoro 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Pratama Bangkalan	1. Capaian IKU Penghimpunan Data ILAP 2. Perjanjian Kerja Sama Pemda
13	Satuan Kerja dengan Pertumbuhan Penerimaan Netto Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Utara 2. KPP Pratama Pamekasan 3. KPP Pratama Lamongan	Sesuai Pertumbuhan Penerimaan Netto Apportal
14	Satuan Kerja dengan Kontribusi PKM Total Tertinggi Terhadap	1. KPP Pratama Ngawi 2. KPP Pratama Pamekasan	Dihitung berdasarkan kontribusi realisasi total PKM KPP terhadap

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
	Penerimaan Netto Satuan Kerja Tahun 2024	3. KPP Pratama Lamongan	realisasi netto KPP tersebut
15	Satuan Kerja dengan Akurasi Realisasi Penerimaan Dibanding Prognosa Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Gresik 2. KPP Pratama Sidoarjo Barat 3. KPP Madya Sidoarjo	Dihitung berdasarkan selisih terkecil antara realisasi penerimaan dengan prognosa per bulan yang sudah disusun
16	Satuan Kerja dengan Akurasi Realisasi Penerimaan Dibanding Komitmen Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Lamongan 2. KPP Pratama Ngawi 3. KPP Madya Gresik	Dihitung berdasarkan selisih terkecil antara realisasi penerimaan dengan komitmen penerimaan Desember
17	Satuan Kerja dengan Pemanfaatan Data Sebelum Tahun Berjalan (PKM) Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Bojonegoro 2. KPP Pratama Pamekasan 3. KPP Pratama Bangkalan	Realisasi IKU Pemanfaatan Data Sebelum Tahun Berjalan Paling Optimal
18	Satuan Kerja dengan Kontribusi PKM Pengawasan Tertinggi Terhadap Penerimaan Netto Satuan Kerja Tahun 2024	1. KPP Pratama Pamekasan 2. KPP Pratama Ngawi 3. KPP Pratama Jombang	Dihitung berdasarkan kontribusi realisasi total PKM Pengawasan (Aktivitas+WRA) KPP terhadap realisasi netto KPP tersebut
19	Satuan Kerja dengan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) Strategis Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Tuban 2. KPP Madya Sidoarjo 3. KPP Madya Gresik	Realisasi IKU P4DK Berbasis Strategis Tahun 2024
20	Satuan Kerja dengan Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Aktivitas Strategis Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Bangkalan 2. KPP Pratama Pamekasan 3. KPP Pratama Ponorogo	Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Berbasis Strategis Tahun 2024
21	Satuan Kerja dengan Penerbitan STP Tahun Berjalan Kewilayahan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Bojonegoro 2. KPP Pratama Mojokerto 3. KPP Pratama Jombang	Realisasi Komponen IKU Persentase Tindak Lanjut Daftar Nominatif STP Tahun Berjalan Berbasis Kewilayahan Tahun 2024
22	Satuan Kerja dengan Pemanfaatan Data Perpajakan Tahun Berjalan Kewilayahan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Pamekasan 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Pratama Bangkalan	Realisasi Komponen IKU Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan Kewilayahan Tahun 2024
23	Satuan Kerja dengan Penambahan Wajib Pajak	1. KPP Pratama Tuban 2. KPP Pratama Jombang	Realisasi Komponen IKU Penambahan Wajib Pajak Hasil

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
	Hasil Ekstensifikasi Terbaik Tahun 2024	3. KPP Pratama Sidoarjo Utara	Ekstensifikasi Tahun 2024
24	Satuan Kerja dengan Realisasi Kepatuhan SPT Tahunan 2024 Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Jombang 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Pratama Bojonegoro	Realisasi Pelaporan SPT Tahunan 2024 dibanding dengan target
25	Satuan Kerja dengan Uji Validitas MFWP Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Lamongan 2. KPP Pratama Tuban 3. KPP Pratama Ngawi	Capaian IKU Uji Validitas Master File Wajib Pajak dalam Rangka Pembenahan Rutin atas Master File Wajib Pajak Tidak Valid sebagai Usaha Penjaminan Kualitas Data 2024
26	Satuan Kerja dengan P4DK Kewilayahan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Bojonegoro 2. KPP Pratama Sidoarjo Utara 3. KPP Pratama Madiun	Realisasi IKU P4DK Berbasis Kewilayahan Tahun 2024
27	Satuan Kerja dengan KPDL Kewilayahan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Utara 2. KPP Pratama Bojonegoro 3. KPP Pratama Jombang	Realisasi IKU KPDL Berbasis Kewilayahan Tahun 2024
28	Satuan Kerja dengan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Gresik 2. KPP Pratama Sidoarjo Utara 3. KPP Madya Sidoarjo	Realisasi dan Potensi Kegiatan Penilaian hasil Kolaborasi dengan Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024
29	Satuan Kerja dengan Usulan Bantuan Penilaian Terbaik Tahun 2024	1. KPP Madya Sidoarjo 2. KPP Madya Gresik 3. KPP Pratama Sidoarjo Utara	Total Skor Pelaksanaan Penilaian dalam Rangka Permintaan Proses Bisnis yang Relevan
30	Satuan Kerja dengan Kinerja Fungsi Pengawasan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Pratama Jombang 3. KPP Pratama Pamekasan	Total Skor Kinerja
31	Satuan Kerja dengan Capaian Kinerja Pemeriksaan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Selatan 2. KPP Pratama Sidoarjo Utara 3. KPP Pratama Ngawi	Capaian Kinerja Pemeriksaan berdasar dua variabel yaitu kuantitas berupa jumlah penyelesaian LHP Konversi (50%) dan Kuantitas berdasarkan pencairan SKP Terbit (50%)

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
32	Satuan Kerja dengan Capaian PKM Pemeriksaan Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Utara 2. KPP Pratama Lamongan 3. KPP Pratama Sidoarjo Selatan	Capaian PKM Pemeriksaan berdasarkan Presentase Pemenuhan PKM Pemeriksaan atas target.
33	Satuan Kerja dengan Capaian Usulan Bahan Baku Pemeriksaan (KKA Pemeriksa) Persentase Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Pamekasan 2. KPP Pratama Madiun 3. KPP Pratama Lamongan	Capaian Usulan Bahan Pemeriksaan atas KKA Pemeriksa berdasarkan pemenuhan KKA Pemeriksa atas target 2 KKA setiap Triwulan oleh setiap Pemeriksa.
34	Satuan Kerja dengan Capaian Pemenuhan Laporan Ketentuan Formal Pemeriksaan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Ngawi 2. KPP Pratama Pamekasan 3. KPP Pratama Ponorogo	Capaian Pemenuhan Laporan Ketentuan Formal berdasarkan penyampaian pelaporan formal secara rutin dan tepat waktu.
35	Satuan Kerja dengan Kualitas Pemeriksaan Terbaik berkaitan dengan Proses Keberatan Tahun 2024	1. KPP Pratama Jombang 2. KPP Pratama Bojonegoro 3. KPP Pratama Mojokerto	Capaian Presentase terbesar dari Produk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) konversi berupa SKP yang tidak diajukan keberatan dibagi dengan Target LHP Konversi.
36	Satuan Kerja dengan Capaian Kinerja Penagihan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Madya Sidoarjo 2. KPP Pratama Sidoarjo Utara 3. KPP Madya Gresik	Time Manajemen, Kualitas, dan Kuantitas (Data Mandor)
37	Satuan Kerja dengan Capaian PKM Penagihan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Pratama Bojonegoro 3. KPP Pratama Jombang	Capaian Persentase PKM Penagihan Tahun 2024 (sebelum Adjustment)
38	Satuan Kerja dengan Capaian Tingkat Efektivitas Tindakan Penagihan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Madya Gresik 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Madya Sidoarjo	Capaian Persentase Efektivitas atas Tindakan Penagihan Tahun 2024
39	Satuan Kerja dengan Capaian Tingkat Kegiatan Penyitaan Terbanyak Tahun 2024	1. KPP Madya Gresik 2. KPP Pratama Gresik 3. KPP Madya Sidoarjo	Kegiatan Penyitaan Terbanyak Tahun 2024
40	Satuan Kerja dengan Jumlah Blokir Terbanyak Tahun 2024	1. KPP Madya Sidoarjo 2. KPP Madya Gresik 3. KPP Pratama Ponorogo	Kegiatan Pemblokiran Terbanyak Tahun 2024
41	Satuan Kerja dengan Kualitas Pengamatan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Jombang 2. KPP Pratama Tuban	Realisasi Jumlah, Jangka Waktu, dan Kualitas Laporan Pengamatan

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
		3. KPP Pratama Sidoarjo Utara	
42	Satuan Kerja dengan Realisasi Tindak Lanjut Diseminasi Lembar Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP) Terbaik Tahun 2024	1. KPP Madya Sidoarjo 2. KPP Pratama Sidoarjo Selatan 3. KPP Madya Gresik	Realisasi Potensi Pajak LIIP
43	Satuan Kerja dengan Kinerja Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Disetujui Terbanyak Tahun 2024	1. KPP Pratama Bojonegoro 2. KPP Pratama Mojokerto 3. KPP Madya Sidoarjo	Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
44	Satuan Kerja dengan Kinerja Kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum Terbanyak Tahun 2024	1. KPP Pratama Bojonegoro 2. KPP Pratama Mojokerto 3. KPP Madya Sidoarjo	Jumlah kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum
45	Satuan Kerja dengan Kolaborasi Penegakan Hukum Pembayaran Terbanyak Tahun 2024	1. KPP Pratama Gresik 2. KPP Madya Sidoarjo 3. KPP Madya Gresik	Kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum berdasarkan Rp pembayaran
46	Satuan Kerja dengan Kegiatan Forensik Digital Terbanyak Tahun 2024	1. KPP Madya Sidoarjo 2. KPP Pratama Lamongan 3. KPP Pratama Bojonegoro	Jumlah kegiatan Forensik Digital
47	Satuan Kerja dengan Pertumbuhan Penyampaian SPT Tahunan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Lamongan 2. KPP Pratama Gresik 3. KPP Pratama Ngawi	Pertumbuhan Penyampaian SPT Tahunan 1770, 1770S, 1770SS dan 1771 Tahun 2024
48	Satuan Kerja dengan Pengelolaan Media Sosial Terbaik Tahun 2024	1. KPP Madya Gresik 2. KPP Pratama Jombang 3. KPP Pratama Bangkalan	Jumlah Postingan Terbanyak di Media Sosial Tahun 2024
49	Satuan Kerja dengan Capaian PKM Edukasi-Wide Revenue Activity Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Pratama Mojokerto 3. KPP Pratama Pamekasan	Capaian PKM Edukasi Wide Revenue Activity Tahun 2024
50	Satuan Kerja dengan Rating Google Review Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Pratama Jombang 3. KPP Pratama Tuban	Rating Tertinggi pada Google Review dan Jumlah Reviewer Terbanyak Tahun 2024
51	Satuan Kerja dengan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Mojokerto 2. KPP Pratama Sidoarjo Utara 3. KPP Pratama Pamekasan	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Tertinggi Tahun 2024

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
52	Satuan Kerja dengan Nilai Inovasi Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Pratama Sidoarjo Utara 3. KPP Madya Sidoarjo	Nilai Inovasi Tertinggi pada Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) Tahun 2024
53	Satuan Kerja dengan Pengiriman Permohonan Keberatan dan Non Keberatan Tercepat Tahun 2024	1. KPP Madya Gresik 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Pratama Tuban	Jangka waktu pengiriman permohonan
54	Satuan Kerja dengan Peraih Tingkat Kemenangan atas Banding dan Gugatan Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Utara 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Pratama Madiun	Tingkat Kemenangan Banding dan Gugatan
55	Satuan Kerja dengan Prosentase Keputusan Keberatan dan Pasal 36 (1) huruf b yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Lanjutan Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Jombang 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Pratama Bojonegoro dan KPP Pratama Ngawi	Jumlah Surat Keputusan Keberatan dan Pasal 36(1) b dengan Amar Putusan Menolak dan Mengabulkan sebagian yang tidak Diajukan Banding atau Gugatan
56	Satuan Kerja dengan Kinerja Terbaik Tahun 2024	KPP Pratama Sidoarjo Utara	1. Pembangunan <i>Good Governance</i> 2. <i>Scoring</i> Jumlah Perolehan Penghargaan 3. Implementasi <i>Corporate Value</i>

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 16 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PAJAK JAWA TIMUR II,



Ditandatangani secara elektronik  
AGUSTIN VITA AVANTIN

